
PERANAN DKUKMPP DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PENGOPTIMALAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI KOTA CIREBON

Resa Uni Natulisiya¹, Nurannisa Khumaeroh Azzahro², Vina Hildayanti³, Diyanah Zulfa⁴,
Vivi Amaliya Vidiyaningsih⁵
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

e-mail: resauninatulisiya13@gmail.com¹, nurannisakhumaeroh@gmail.com²,
hildayantivinaa@gmail.com³, diyanahh23@gmail.com⁴, viviamalia829@gmail.com⁵

Accepted: 26/9/2024; **Published:** 28/9/2024

ABSTRAK

Peranan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangatlah besar, salah satu caranya adalah melalui pengoptimalan Industri Kecil Menengah (IKM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran DKUKMPP dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengoptimalan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Cirebon. Penelitian ini dilaksanakan di Mall UKM Kota Cirebon, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yakni penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui *literature*, penelitian terdahulu, buku, artikel, maupun arsip-arsip yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Industri Kecil Menengah (IKM) berkontribusi besar terhadap perekonomian melalui pajak, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Kota Cirebon, terdapat 2.764 IKM dengan berbagai jenis usaha, tetapi mereka masih menghadapi kendala seperti keterbatasan modal dan kurangnya pemahaman tentang izin usaha. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon mendukung perkembangan IKM melalui perencanaan, pengendalian izin usaha, dan pembinaan intensif untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha, mempercepat pertumbuhan, dan mendorong legalitas usaha.

Kata Kunci: DKUKMPP, IKM, Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

The role of the Cirebon City Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Trade and Industry Service (DKUKMPP) in increasing economic growth is very large, one way is through optimizing Small and Medium Industries (IKM). The purpose of this study is to analyze the role of DKUKMPP in increasing economic growth through optimizing Small and Medium Industries (IKM) in Cirebon City. This research was conducted at the Cirebon City UKM Mall, the research method used was a qualitative approach with the type of research, namely field research. Data sources in the study were primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews, observations and documentation. While secondary data was obtained through literature, previous research, books, articles, and archives related to the

object of this study. The results of this study indicate that Small and Medium Industries (IKM) contribute greatly to the economy through taxes, employment absorption, and improving community welfare. In Cirebon City, there are 2,764 IKM with various types of businesses, but they still face obstacles such as limited capital and lack of understanding of business permits. The Department of Cooperatives, SMEs, Trade, and Industry (DKUKMPP) of Cirebon City supports the development of SMEs through planning, business permit control, and intensive coaching to improve business actors' knowledge, accelerate growth, and encourage business legality.

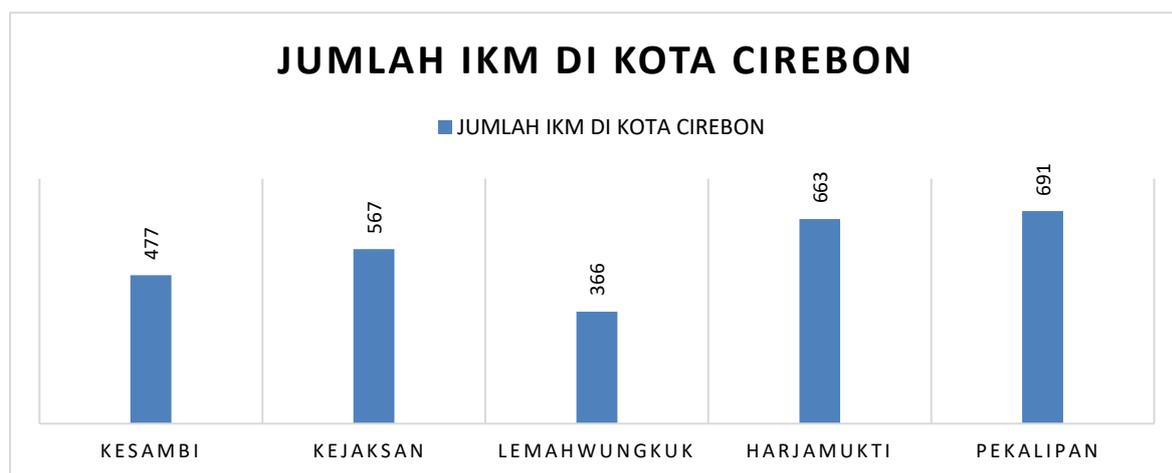
Keywords: DKUKMPP, SMEs, Economic Growth.

PENDAHULUAN

Peranan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangatlah besar, salah satu caranya adalah melalui pengoptimalan Industri Kecil Menengah (IKM). Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan salah satu penopang perekonomian bangsa. IKM merupakan salah satu sumber penghasilan Negara melalui pajak yang dibayarnya. Tidak hanya untuk Negara, IKM juga berperan untuk menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran. Selain itu untuntutuk meningkatkan penghasilan masyarakat sehingga kesejahteraan bisa bertambah.

Sekarang ini, di Kota Cirebon sudah banyak terdapat Industri Kecil Menengah (IKM). Dengan semakin banyaknya IKM yang ada di Kota Cirebon ini maka pemerintah kota bisa terbantu dalam mengatasi pengangguran yang ada. Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di Kota Cirebon tersebar di lima Kecamatan yakni Kecamatan Kesambi, Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kecamatan Harjamukti dan Kecamatan Pekalipan yang terdiri dari beberapa jenis yakni pengolahan pangan, tekstil, barang kulit, pengolahan kayu dan lain sebagainya. Berikut merupakan data jumlah Industri Kecil Menengah IKM di lima Kecamatan:

Grafik 1. Jumlah IKM Kota Cirebon Tahun 2023



Sumber: Arsip DKUKMPP Kota Cirebon

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa jumlah IKM yang diperoleh dari data updtng dari 5 kecamatan di Kota Cirebon. Jumlah keseluruhan IKM yang terdapat di Kota Cirebon menurut data updating yaitu sebanyak 2.764 yang mana dari jumlah keseluruhan tersebut tidak termasuk UMKM didalamnya. IKM paling banyak berada di Kecamatan Pekalipan yakni sebanyak 691 unit usaha, sedangkan jumlah IKM paling sedikit berada di Kecamatan Lemahwungkuk sebanyak 366 unit usaha. Tetapi dalam menjalankan usahanya para pelaku

Industri Kecil Menengah (IKM) masih memiliki banyak hambatan. Hambatan yang dihadapi IKM di Kota Cirebon dari mulai dari banyaknya Industri Kecil Menengah yang terkendala oleh modal, belum memahami pentingnya mengurus izin usaha dan lain sebagainya, hal tersebut dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri kecil menengah.

Untuk mengatasi beberapa hambatan yang dialami industri kecil menengah diatas, maka diperlukan peran dari Pemerintah. Dalam hal ini yang paling berperan adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) sebagai salah satu pendorong IKM untuk lebih maju dan berkembang. DKUKMPP dibagi menjadi tiga bidang berdasarkan tugas dan fungsinya yaitu Bidang Koperasi dan UKM, Bidang Perdagangan, dan Bidang Perindustrian. Bidang Koperasi dan UKM bertugas menjalankan pengawasan terhadap koperasi dan UKM, Bidang Perdagangan bertugas menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan sektor perdagangan baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri, sedangkan Bidang Perindustrian bertugas menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan sektor industri.

Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi kerakyatan harus mendapatkan pembinaan secara khusus serta bertahap agar terus berkembang dan mampu berperan secara efektif dan efisien dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran sehingga mampu berkontribusi besar pada perekonomian nasional. Pengembangan Industri Kecil Menengah di Kota Cirebon dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan pesat IKM yang ada di masyarakat tidak terlepas dari adanya peran DKUKMPP sebagai lembaga pengawas sekaligus sebagai lembaga yang memfasilitasi IKM. Dari latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah Bagaimana Peran DKUKMPP dalam meningkatkan Pertumbuhan melalui pengoptimalan IKM (Industri Kecil Menengah) di Kota Cirebon.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis tentang masalah yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Objek dalam penelitian Mall UKM Kota Cirebon. Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari suatu hasil penelitian. Sumber data dalam penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun wawancara dilakukan bersama Kepala DKUKMPP beserta para staff khususnya di bidang Koperasi dan UKM, bidang Perdagangan dan Perindustrian. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui *literature*, penelitian terdahulu, buku, artikel, maupun arsip-arsip yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Industri Kecil Menengah (IKM)

Pengembangan ekonomi merupakan suatu proses dimana suatu negara berupaya dalam menciptakan ekonomi yang terus mengalami pertumbuhan dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya. Di Indonesia, menjadi salah satu tugas IKM dalam proses percepatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini tentunya menjadi tugas IKM yang ada di kota Cirebon juga. Keberadaan IKM di Indonesia berdampak positif bagi perkembangan perekonomian nasional. Kemajuan industri kecil dan menengah di Indonesia akan menjadi sumber daya yang berharga untuk penciptaan lapangan kerja, serta pendorong utama pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

Menurut Kementerian Koperasi (2005), IKM memiliki tugas penting dalam perekonomian Indonesia:

1. Perusahaan adalah pemain utama di banyak sektor ekonomi.
2. Memberikan peluang kerja yang luar biasa.
3. Menjadi pemain penting dalam mengembangkan kegiatan ekonomi lokal dan memberdayakan masyarakat lokal.
4. Jadilah inovator untuk pasar baru dan jadilah sumber inovasi baru.
5. Kontribusi IKM dapat menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

IKM lebih fleksibel daripada perusahaan besar. Untuk itu diperlukan informasi yang akurat dan perhatian khusus agar industri kecil dan menengah dapat mengakses jaringan pasar yang luas dan mampu bersaing.

Peranan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, DKUKMPP ini memiliki peranan penting dalam hal tersebut. Ini adalah tujuan penting yang membutuhkan serangkaian perubahan ekonomi secara bertahap untuk menciptakan fondasi yang lebih stabil dan sejahtera. Hal ini juga secara umum memberikan perkembangan positif bagi IKM. Dalam hal ini DKUKMPP memiliki tugas penting dalam meningkatkan pertumbuhan, adapun peranan dinas dalam hal ini yaitu:

1. Melakukan perencanaan dan pengembangan industri

Menurut Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kota Cirebon menjelaskan bahwa dinas perindustrian pada bagian perencanaan dan pengembangan industri memiliki tugas pokok dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta laporan penyusunan rencana pembangunan industri Daerah Kota, kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat, dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri.

2. Melakukan penngendalian Izin Usaha Industri

Menurut Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kota Cirebon menjelaskan tugas dalam melakukan Pengendalian Izin Usaha Industri yaitu penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Daerah Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

3. Melakukan pembinaan mengenai sistem informasi industri

Menurut Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kota Cirebon dijelaskan tugas dinas perindustrian dalam melakukan pembinaan sistem informasi industri yaitu melakukan penyusunan laporan penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Daerah Kota Berbasis

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas), diseminasi dan publikasi data informasidan analisa industri kabupaten/kota melalui SIINas, pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kota dalam penyampaian data ke SIINas, fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis sistem informasi industri nasional (SIINas), pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kota berbasis sistem informasi industri nasional (SIINas).

OSS (Online Single Submission)

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

OSS digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut: Berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing. Biaya perizinan usaha melalui OSS tidak dikenakan biaya, tetapi untuk pemenuhan komitmen Izin Mendirikan Bangunan dikenakan retribusi sesuai tarif yang berlaku.

Salah satu cara dalam mengatasi permasalahan yang didasarkan pada kesadaran pelaku usaha dalam melakukan perizinan usaha, maka pemerintah secara resmi menerbitkan OSS ini guna memudahkan pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya dengan lebih mudah. Disini juga terlibat adanya peranan dinas perdagangan dalam mensosialisasikan sistem OSS ini sehingga banyak dari pelaku usaha yang melakukan perizinan usaha. Disini juga dinas perindustrian berperan dalam keberlanjutan dari sistem ini, artinya dinas perindustrian melakukan survei secara langsung bagi pelaku usaha yang telah melakukan pengisian persyaratan untuk mensinkronkan antara data dengan kenyataannya secara pasti dan detail.

Sebelum melakukan sosialisasi dinas perindustrian juga melakukan pemetaan terhadap kelompok pelaku usaha guna memudahkan mana yang perlu dituntut lebih untuk melakukan perizinan usahanya. Selain itu juga tidak hanya sebatas sampai pada sosialisasi saja, peran dinas perindustrian juga masih berlanjut pada pembinaan pelaku-pelaku usaha yang dengan bijak telah memegang surat izin usaha dalam pengembangan usahanya. “Pembinaan yang dilakukan berupa survei secara langsung ke tempat usaha dan menjelaskan mengenai regulasi-regulasi terbaru, selain itu juga mensosialisasikan informasi yang dapat berguna dalam peningkatan penjualan dan daya saing usaha tersebut. Seringkali dinas perindustrian juga mengajak kolaborasi pelaku usaha yang dalam pembinaan ini apabila ada event pameran-pameran di berbagai daerah. Tentunya hal tersebut menjadi suatu upaya dalam pengoptimalan IKM yang ada di Kota Cirebon” ujar bapak Lukman Hakim, S.Sos., M.Si.

Pembinaan yang *intens* bagi para pelaku industri menjadi kunci utama yang dapat dilakukan oleh dinas perindustrian, karena dengan hal ini para pelaku industri membutuhkan banyak pengetahuan agar dapat mengembangkan industrinya. Pembinaan ini tidak hanya sebatas memberikan wawasan bagi pelaku industri, tetapi dengan adanya pembinaan ini menjadi suatu batu loncatan agar para pelaku industri lebih memahami keuntungan dari lelagitas izin usaha dan mengubah pola pikir agar bisa menjadi pelaku usaha yang cerdas sehingga dengan ini mampu mendorong intensitas perkembangan IKM (Industri, Kecil dan Menengah). Selain itu juga bukan hanya peranan dinas perindustrian saja, akan tetapi peran pelaku industri juga sangat penting salah satunya yaitu dalam pengembangan inovasi

produknya. Pengembangan inovasi produk dapat dilakukan guna untuk memperluas jaringan pasar dan meningkatkan kualitas industrinya, tentunya hal ini juga menjadi faktor penting dalam pengembangan industri.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasannya dinas perindustrian memiliki peranan yang cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi kota Cirebon, hal ni dikarenakan dinas perindustrian ini bertugas sebagai pelaku pendampingan secara langsung terhadap seluruh industri kecil menengah yang ada di Kota Cirebon sendiri. Berbagai upaya dalam memaksimalan peranan tersebut, dinas juga telah bersinergi untuk senantiasa mendampingi dan mengarahkan para pelaku industri kecil menengah ini agar dalam menjalankan industrinya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Apabila kinerja industri kecil menengah sudah dikatakan berkembang dengan baik maka hal tersebut akan berdampak baik pula terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon. Oleh karena itu meskipun dinas perindustrian ini memiliki peranan yang cukup penting, tetapi tidaklah cukup apabila tanpa disertai adanya kerja sama yang baik dari pelaku industri.

KESIMPULAN

Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan salah satu penopang perekonomian bangsa. IKM merupakan salah satu sumber penghasilan Negara melalui pajak yang dibayarnya. Tidak hanya untuk Negara, IKM juga berperan untuk menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran. Selain itu untuk meningkatkan penghasilan masyarakat sehingga kesejahteraan bisa bertambah. Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di Kota Cirebon terbilang sudah banyak, jumlah keseluruhan IKM yang terdapat di Kota Cirebon menurut data updating yaitu sebanyak 2.764 yang mana dari jumlah keseluruhan tersebut tidak termasuk UMKM didalamnya. IKM ini tersebar di lima Kecamatan yakni Kecamatan Kesambi, Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kecamatan Harjamukti dan Kecamatan Pekalipan yang terdiri dari beberapa jenis yakni pengolahan pangan, tekstil, barang kulit, pengolahan kayu dan lain sebagainya.

Tetapi dalam menjalankan usahanya para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) masih memiliki banyak hambatan. Hambatan yang dihadapi IKM di Kota Cirebon dari mulai dari banyaknya Industri Kecil Menengah yang terkendala oleh modal, belum memahami pentingnya mengurus izin usaha dan lain sebagainya, hal tersebut dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri kecil menengah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon memiliki tugas penting dalam meningkatkan pertumbuhan, adapun peranan Dinas dalam hal ini yaitu:

1. Melakukan perencanaan dan pengembangan industri
2. Melakukan penngendalian Izin Usaha Industri
3. Melakukan pembinaan mengenai sistem informasi industri

Pembinaan yang intens bagi para pelaku industri menjadi kunci utama yang dapat dilakukan oleh dinas perindustrian, karena dengan hal ini para pelaku industri membutuhkan banyak pengetahuan agar dapat mengembangkan industrinya. Pembinaan ini tidak hanya sebatas memberikan wawasan bagi pelaku industri, tetapi dengan adanya pembinaan ini menjadi suatu batu loncatan agar para pelaku industri lebih memahami keuntungan dari lelagitas izin usaha dan mengubah pola pikir agar bisa menjadi pelaku usaha yang cerdas sehingga dengan ini mampu mendorong intensitas perkembangan IKM (Industri, Kecil dan Menengah).

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, R., Syahputra, M., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 1(3), 190-198.
- Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi. Perizinan Usaha OSS (Online Single Submission).(sippn.menpan.go.id) diakses pada 5 Oktober 2023 12.00 WIB
- Kristianti, R. D., Chusen, M. R. A., & Yasin, M. (2023). Analisis Pola Spasial Ikm (Industri Kecil Menengah) Dan IRT (Industri Rumah Tangga) Di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(2), 78-83.
- Kristiyanti, M. (2012). Peran strategis usaha kecil menengah (UKM) dalam pembangunan nasional. *Majalah Ilmiah Informatika*, 3(1), 63-89.
- Maghfiroh, I. (2017). *Pengaruh Inovasi Proses Terhadap Kinerja Pemasaran Mediasi Oleh Keunggulan Bersaing Pada Sentra IKM Manik-Manik Plumbon Gambang Gudo Jombang* (Doctoral dissertation, STIE PGRI Dewantara Jombang.)
- Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kota Cirebon
- Putri, R. A. I., Rohayati, Y., & Aisha, A. N. (2015). Evaluasi Pemenuhan Kriteria CPPB-IRT dan Sertifikasi Halal pada UKM Pelangi Rasa. *Jurnal Rekayasa Sistem & Industri (JRSI)*, 2(03), 17-24.
- Soleh, A. (2014). Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2).
- Syahputra, R. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 183-191.).
- Wahyudi. R. (2022). Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah Kota Medan. *Sibatik Journal* | Volume 1 No.5
- Wawancara dengan Bapak Lukman selaku Staff Bidang Perindustrian DKUKMPP Kota Cirebon.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)